

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Post

Senin
15 Januari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Dedy Ferianto, Kuasa Hukum Peserta PPPK Guru di Buton Selatan Ajukan Surat Keberatan dan Pembatalan Atas Surat Pengumuman Akhir Panselda Busel ke BKN RI Hingga ke Menpan RB dan Komisi ASN



Peserta PPPK Guru di Busel yang gagal engadu ke BKN RI didampingi kuasa hukumnya Dedi Ferianto

Pewarta: Eron

BUSEL, BP-Sehubungan adanya dugaan kecurangan dalam seleksi CASN PPPK Kabupaten Buton Selatan T.A 2023, Dedi Ferianto SH sebagai kuasa hukum secara resmi telah mengajukan surat keberatan dan Pembatalan atas Surat Pengumuman Akhir Panselda Kabupaten Buton Selatan Nomor: 18/PANSELDA-CASN/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada Kepala BKN RI selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kanreg IV BKN Makassar, Menpan RB dan Komisi ASN.

DWP Buton Gelar Lomba Daur Ulang Sampah, Rangkaian HUT DWP ke-24 dan Hari Ibu ke-95



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Tak dapat dipungkiri, saat ini sampah menjadi persoalan pelik yang menjadi isu

global. Namun, menyulap sampah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi adalah hal yang

patut diacungi jempol. Hal ini pula yang menarik perhatian, Dharma

Lanjutkan ke Hal: 7

Dalam siaran persnya, Dedi mengatakan penilaian SKTT sangat tidak transparan, syarat kecurangan dan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) oleh karena penilaian hanya ber-

Lanjutkan ke Hal: 7

Program Air Mengalir Tiap Hari dan Pembayaran Online QRIS Diluncurkan

Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau membuat terobosan baru dengan meluncurkan program air mengalir setiap hari untuk zona tiga meliputi Kecamatan Lea-Lea dan Kecamatan Kokalukuna. Kemudian, program pembayaran air melalui online yakni QRIS (Quick Response Indonesian Standar). Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si telah meluncurkan

Lanjutkan ke Hal: 7

Akhir Januari 2024, Petani Sudah Menanam Padi Sawah



Kadis Pertanian dan Ketapang Baubau Muh Rais SP

Peliput : Kasrun

BAUBAU, BP-Memasuki musim tanam dan penghujan tahun 2024, Dinas Pertanian (Dis-tan) dan Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Baubau memprioritaskan petani untuk menanam padi sawah selain tanaman lainnya. Dan saat ini prosesnya, masih sementara pengolahan tanah yang direncanakan akhir Januari sudah mulai menanam untuk padi sawah karena sudah me-

masuk musim tanam.

Demikian dikatakan Kadistan dan Ketapang Kota Baubau Muh Rais, SP ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu (10/1/2024).

Hanya saja menurut Muh Rais, terkait dengan padi sawah ini, ada keluhan petani karena intensitas hujan masih kurang, sehingga ada beberapa petani yang meragukan sehingga pada musim ini petani akan kekurangan

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Dedy Ferianto, Kuasa Hukum Peserta PPPK Guru di Buton Selatan Ajukan Surat Keberatan dan Pembatalan Atas Surat Pengumuman Akhir Panselda Busel ke BKN RI Hingga ke Menpan RB dan Komisi ASN

dasarakan subjektifas Tim Penilai yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas BKPSDM Pemerintah Buton Selatan tanpa indikator penilaian yang jelas dan objektif. Peserta yang mendapatkan nilai CAT terbaik berubah menjadi nilai SKTT terendah sedangkan peserta yang mendapatkan nilai CAT sangat rendah mendapatkan nilai SKTT tertinggi dan sempurna.

Peserta yang sudah mengabdikan belasan tahun sebagai guru

honorar tidak lulus sedangkan yang baru beberapa bulan dan 1 tahun dinyatakan Lulus. "Ini sangat aneh dan tidak manusiawi," ucapnya.

Selain itu, kata Dedy Ferianto Kepala BKPSDM Busel diduga memberikan informasi kelulusan kepada peserta berperingkat 50 dalam ujian CAT sebelum pengumuman resmi dilakukan, dan ada juga oknum-oknum makelar diduga meminta setoran Rp 25-30 Juta bagi peserta ingin di luluskan.

"Oleh karenanya kami meminta SK pengumuman tersebut dan penilaian kelulusan berdasarkan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dibatalkan oleh Panseldas dan dikembalikan kepada penilaian hasil ujian CAT (Computer Assisted Test) lebih jujur, adil, objektif dan transparan.

Dalam Pelaksanaan Pengadaan PPPK wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kompetitif, adil, transparansi, bebas KKN dan pungutan

liar. Sesuai ketentuan Pasal 38 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023, Panseldas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah," terangnya.

Dedy Ferianto pun meminta aparat penegak hukum untuk masuk melakukan rangkaian penyelidikan terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK di Buton Selatan. (*)

DWP Buton Gelar Lomba Daur Ulang Sampah, Rangkaian HUT DWP ke-24 dan Hari Ibu ke-95



Wanita Persatuan Kabupaten Buton dibawah asuhan Penasehat Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari dan Ketua DWP Buton Ny. Kiki Amalia Asnawi menggelar Lomba Daur Ulang Sampah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-24 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-95 Tingkat Kabupaten Buton.

Lomba Daur Ulang sampah ini digelar Minggu, 24 Desember 2023, di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa dan diikuti sebanyak 53 peserta yang berasal dari Dharma Wanita Persatuan OPD, instansi vertikal hingga DWP Kecamatan se-Kabupaten Buton. Yang spesial, Ketua DWP OPD dan Kecamatan terjun sebagai peser-

ta bersama beberapa anggotanya.

Bertindak sebagai juri, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini Cabang Buton Ny. Mona Ledrik, juga Ketua DWP Buton Ny. Kiki Amalia Asnawi serta Pemilik Salon Kecantikan Ny. Wa Ode Sarniyati.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton Ny. Kiki Amalia Asnawi sangat kagum dengan kemampuan para peserta dengan berbagai kreativitasnya dalam memanfaatkan sampah yang ada disekitarnya untuk dibuat suatu karya yang cantik dan yang pasti bernilai ekonomi.

"Saya memberi semangat kepada para ibu-ibu dharma wanita untuk menunjukkan kreatifitasnya masing-masing. Ada

yang memanfaatkan limbah berupa sisik ikan menjadi bunga yang cantik. Ada pula yang menyulap kantong plastik menjadi sebuah karya yang luar biasa. Ada yang membuat pajangan dari limbah laut, serta masih banyak inovasi lainnya yang pastinya membuat juri berpikir keras untuk menentukan siapa yang keluar menjadi pemenangnya," ungkap istri Jenderal ASN Buton.

Sementara itu, Ny. Mona Ledrik mengatakan kreatifitas ibu-ibu peserta sangat tinggi dengan hasil karya yang luar biasa bervariasi dari bahan-bahan yang biasanya jadi sampah.

"Ibu-ibu ini semuanya kreatifitasnya sangat tinggi. Tidak gampang loh dari bahan-bahan

yang biasanya jadi sampah tiba-tiba jadi bunga. Ada yang jadi tas, ada yang jadi pajangan, ada yang jadi cermin, ada pula yang jadi kalung. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita bermanfaat karena ibu-ibu kita punya kreatifitas yang tinggi. Terima kasih atas kreatifitas ibu-ibu pada sore hari ini," tutur istri Kajari Buton.

Hasil lomba akan diumumkan pada perayaan Puncak Hari Ibu Tingkat Kabupaten Buton yang akan digelar pada tanggal 27 Desember mendatang. Selain Lomba daur ulang sampah, pelaksanaan lomba hari kedua juga diwarnai lomba estafet kardus dan lomba kereta balon yang berlangsung sangat meriah. (*)

Program Air Mengalir Tiap Hari dan Pembayaran Online QRIS Diluncurkan

kan kedua program tersebut saat membuka kemah eksekutif di Bumi Perkemahan Samparona Jumat sore (22/12/2023).

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, program air mengalir setiap hari akan dimulai per tahap dan saat ini zona 3 sudah akan dipastikan airnya mengalir tiap hari. Dan ini adalah bagian dari kinerja yang diajukannya sebagai inovasi daerah.

"Semoga zona-zona yang lain segera melakukan percepatan untuk kita penuh. Dan dengan mengucapkan bismilahi Rahmani Rahim air mengalir yang telah ditetapkan di zona tiga akan kita laksanakan," ujar-

nya.

Adapun wilayah zona 3 yang akan mengalir airnya setiap hari adalah Kecamatan Lea-Lea Kelurahan Kantalai, Kelurahan Kalia-Lia, Kelurahan Lowu-Lowu dan Kelurahan Kolese. Sedangkan untuk Kecamatan Kokalukuna yakni Kelurahan Liwuto dan Sukanayo.

Sementara itu, untuk pembayaran melalui online QRIS menurut Dr Muh Rasman, sudah akan diberlakukan digital yakni menggunakan QRIS. Oleh sebab itu, bagi yang sudah pernah melakukan pembayaran melalui

QRIS dipersilahkan dan bagi yang belum untuk segera menggunakan QRIS.

Di tempat terpisah pimpinan Bank Sultra Cabang Baubau, Ainul Hasyim mendukung penuh program Pj Wali Kota Baubau karena adalah bagian dari Bank Sultra. Termasuk pembayaran online via QRIS.

"QRIS Bank Sultra itu salah satu bentuk dukungan Bank Sultra terhadap Pemkot Baubau. Dimana Time lininya dari PDAM ini di Januari 2024, dan masyarakat bisa menikmati via QRIS. Kami dari Bank Sultra siap melayani di manapun dan kapan pun juga," tegasnya. (*)

Akhir Januari 2024, Petani Sudah Menanam Padi Sawah

gan air lagi. Namun pihaknya berharap dalam waktu dekat ini hujan semakin banyak intensitasnya sehingga keresahan itu tidak menjadi kendala lagi bagi petani.

Disamping itu, untuk padi sawah terutama di area hulu yang ada di petani di Karing-Karing sudah banyak pohon yang habis di tebang, sehingga yang menjadi kendala pada saat musim kemarau tentunya akan mengalami kekeringan dan dapat dipastikan pada saat musim hujan akan

kebanjiran.

Terkait produksi sawah di Kota Baubau, Muh Rais menjelaskan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan produksi dimana untuk padi sawah pada tahun 2022 produksi hanya 4,3 ton per hektar, dan pada tahun 2023 produksi mencapai 4,7 ton per hektar. Kenaikan dikarenakan Distan dan Ketapang pernah penadapan beni padi yang baru varietasnya yakni Santana dimana memang orang Baubau mengatakan beras karing-karing akan tetapi

selama ini benih yang digunakan itu benih yang sudah berulang kali digunakan dan tidak pernah di ganti.

"Pada tahun 2022 kita ganti benih padi yang baru tetap jenis Santana sehingga produksi kita lebih tinggi, sehingga kemarin bisa mendongkrak produksi yang tadinya hanya 4,3 ton per hektar sekarang bisa sampai 4,7 ton per hektar. Pada tahun 2024 ini semoga masih bisa tetap kita pertahankan untuk padi sawah," ujarnya. (*)

Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara soal Wacana Pemakzulan



Puan Maharani menanggapi wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disampaikan sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil.

Laporan: Hasim

SOLO-Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana pemakzulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil.

Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu mengatakan usulan pemakzulan merupakan aspirasi warga negara. Mekanisme pemakzulan sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Kita jalankan konstitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan saja disampaikan," ka-

tanya usai meresmikan Gedung Olah Raga (GOR) Bung Karno di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/1).

Namun, Puan mengimbau semua pihak tetap menjaga kondusivitas menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

Putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga mengingatkan agar aparat penegak hukum menjaga netralitas.

"Kita sama-sama menjaga pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan dengan jujur dan adil," kata Puan.

Adapun wacana pe-

makzulan itu muncul ketika kelompok sipil beraudiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (9/1).

Mahfud tidak menanggapi dengan tegas usulan yang disampaikan koalisi sipil tersebut. Calon wakil presiden nomor urut 3 itu pun mempersilakan mereka menyalurkan aspirasi tersebut lewat DPR RI.

Sementara itu, Puan mengaku belum mendapat informasi adanya usulan pemakzulan tersebut ke DPR RI.

"Saat ini DPR masih dalam masa reses. Jadi saya masih belum mendapat masukan apapun terkait dengan hal itu," katanya. (*)

Gibran Tanggapi Isu Pemakzulan Jokowi: Ya Monggo



Putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menanggapi isu pemakzulan.

Laporan: Hasim

SOLO- -- Putra Presiden Joko Widodo sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka irit bicara saat ditanya soal isu pemakzulan bapaknya. Usulan tersebut disampaikan sekelompok orang saat menemui Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa (9/1).

Saat ditanya tanggapannya terkait pemakzulan tersebut, Gibran justru mempersilakan Wali Kota Solo itu mengatakan pemerintaha pun siap menerima masukan dari masyarakat.

"Ya, monggo. Ka-

lau ada masukan dari warga, evaluasi ya kami tampung. Terima kasih," katanya di Balai Kota Solo, Kamis (11/1).

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mengeluhkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka mengusulkan agar pemilu dilaksanakan tanpa presiden.

Gibran enggan menanggapi saat ditanya soal Jokowi yang dianggap campur tangan terlalu jauh pada Pemilu kali ini.

"Ya, itu biar warga yang menilai," katanya.

Sementara itu, Ketua

DPR RI Puan Maharani mengatakan usulan pemakzulan tersebut merupakan aspirasi warga negara.

"Kita jalankan konstitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan saja disampaikan," katanya usai meresmikan Gedung Olah Raga (GOR) Bung Karno di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Namun Puan mengimbau semua pihak tetap menjaga kondisi agar kondusif menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Di lain pihak, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Pj Wali Kota Baubau Dan Forkopimda Bahas Penertiban APK



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si dan Forkopimda mendiskusikan rencana penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Di Kota Baubau. Senin malam (11/1/2024) di Rujab Wali Kota Baubau.

Menurut Dr Muh Rasman Manafi, ada dua hal yang menjadi perhatian dalam hal penertiban APK di Kota Baubau yakni pertama terkait persiapan menghadapi Pemilu dan memasuki tahapan Pemilu. Karena tahapan Pemilu begitu penting dan berefek kemana-mana termasuk APK.

Pasalnya, selain APK berefek pada popularitas juga berefek pada lingkungan.

Apalagi, sekarang ini sudah memasuki

musim hujan, sehingga harus diperhatikan baik-baik karena sudah memasuki musim hujan dan sudah banyak APK sehingga dikhawatirkan nanti jatuh dan memakan korban.

"Ini harus segera kita ambil langkah, saya kira kita sangat tidak terlambat dan sangat tepat segera ambil langkah dan segera kita sepakati waktu kapan kita mulai lakukan. Untuk poin ini jangan lama-lama kita putuskan. Kalau memang kita

sudah sepakati waktunya tinggal metodenya seperti apa. Kalau bisa saya menyarankan kita awali dengan kerja bakti sekaligus bagi tugas. Yang orang Kelurahan, Kecamatan urusi wilayahnya dan teman-teman yang berkaitan dengan Pemilu ini sudah mulai fokus pada penertiban APK, Jadi sekaligus kita kerja. Jadi kita menggerakkan sumber daya itu jadi lebih total. Dan saya berharap dari Forkopimda bergerak bersama sep-

erti kita," ujarnya. Terkait pelanggaran yang mungkin akan terjadi, orang nomor satu di Kota Baubau ini mengakui, hal ini menjadi bagian penting, baik itu pelanggaran terhadap titik pemasangan APK maupun ASN yang berhubungan dengan netralitas.

"Kita meminta KPU dan Bawaslu juga sebagai penyelenggara untuk bersinergi. Setelah rapat ini tentu kita akan rapat bersama KPU, kita manfaatkan Desk Pemilu kita dan sampaikan langkah-langkah yang akan kita ambil," tutupnya. (*)

JK soal Wapres Salam Tiga Jari di PDIP: Terserah Pak Ma'ruf Lah

Laporan: Hadi

JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) merespons Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang menunjukkan salam metal ketika menghadiri HUT ke-51 PDIP.

JK menyebut hal tersebut bukan hal besar dan sah-sah saja dilakukan Ma'ruf Amin sebagai warga negara.

"Terserah dia sebagai warga negara boleh-boleh aja," kata JK di Kediamannya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta, Rabu (10/1).

Ia pun menyebut Ma'ruf berhak menentukan pilihannya kepada capres yang ada. JK juga menyinggung nama Presiden Jokowi dalam merespons hal tersebut.

"Mau satu, mau dua, mau tiga, terserah Pak Ma'ruf lah," ucapnya. "Ya enggak apa apa juga, karena Pak

Jokowi juga begitu kan," imbuhnya.

Jubir Jelaskan Posisi Politik Wapres Ma'ruf Usai Salam Metal Tiga Jari

Kendati demikian, JK tak menjelaskan maksud dari menyebutkan nama Jokowi saat merespons isu tersebut.

Sebelumnya, Ma'ruf menunjukkan salam tiga jari bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan sejumlah elite PDIP lain serta partai pengusung.

Ma'ruf pada kesempatan itu hadir menggantikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang absen karena tidak diundang. Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam. Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki

Baidlowi buka suara terkait salam metal yang diperlihatkan Ma'ruf. Ia pun memastikan Ma'ruf bersikap netral di Pilpres 2024.

"Wapres KH Ma'ruf Amin, konsisten mengambil posisi netral dalam kontestasi Pilpres 2024, seperti sering disampaikan dalam berbagai kesempatan," kata Masduki dalam keterangannya.

Masduki menilai salam metal tiga jari yang ditunjukkan Ma'ruf tak bisa otomatis dipersepsikan sebagai bentuk dukungannya kepada Ganjar.

Menurut Masduki, salam metal justru menunjukkan Ma'ruf menghormati tuan rumah. Selain itu juga memperlihatkan keakraban antara Ma'ruf dan PDIP. Metal akronim dari merah total,

warna yang selama ini dipakai PDIP.

"Salam metal (tiga jari) tersebut murni salam keakraban, menghargai HUT PDIP. Salam tersebut sudah lama dipakai PDIP, metal menunjukkan akronim merah total, sebagai warna bendera partai," ujarnya.

Sementara, Presiden Jokowi kerap diisukan tak netral dalam Pemilu 2024.

Isu netralitas itu diduga lahir lantaran putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Dalam perjalanannya, putusan MK itu juga dianggap melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (*)

itu mengingatkan agar aparat penegak hukum menjaga netralitas mereka.

"Kita sama-sama menjaga pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan

dengan jujur dan adil," kata Puan.

Mahfud sendiri tidak menanggapi dengan tegas usulan yang disampaikan koalisi sipil tersebut. Mantan Hakim Konstitusi itu

pun mempersilakan mereka menyalurkan aspirasi tersebut lewat DPR RI.

Puan mengaku belum mendapat informasi terkait usulan

tersebut ke DPR RI. "Saat ini DPR masih dalam masa reses. Jadi saya masih belum mendapat masukan apapun terkait dengan hal itu," katanya. (*)

<https://www.baubaupost.com>

Senin, 15 Januari 2024

Pj Gubernur Sultra ABR Pimpin Peringatan Hari Jadi Kolaka Timur ke -11



Pewarta: Mashuri

KOLTIM, BP-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Jadi ke-11 Kabupaten Kolaka Timur yang digelar di Plataran Rujab Bupati Koltim, Kamis (11/01/24).

Peringatan Hari Jadi ini mengusung tema "Sebelas Tahun Wonua Sorume, Terus Melaju Untuk Kolaka Timur Maju".

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Sultra mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-11 kepada Pemkab dan seluruh Masyarakat Kabupaten Koltim. Teriring doa dan harapan, semoga Koltim semakin Maju, Sejahtera, dan Modern dari waktu ke waktu," kata Pj Gubernur mengawali sambutannya.

Andap Budhi selanjutnya mengungkapkan bahwa terdapat 3 (hal) yang akan disampaikan pada kesempatan peringatan Hari Jadi ini, yakni: Pertama, Alhamdulillah atas kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan perlindungan Allah SWT hingga sebelas tahun kita dapat menjalani dinamika roda pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur.

Kedua, bersyukur dan juga berterima kasih. Bersyukur atas segenap capaian dan

prestasi yang telah berhasil diraih. Berterima kasih kepada para Pendahulu, seperti 9 Tokoh Pemekaran, para Bupati/Wakil Bupati pada masanya serta para pihak yang telah berjasa dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten ini.

Terakhir, sebagai Kabupaten yang berkomitmen semakin maju kedepannya, agar mampu merefleksikan apa saja kinerja yang belum dilaksanakan dan segera menyusun rencana tindak lanjutnya yang tertuang dalam berbagai rencana pembangunan, baik jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan," tandasnya.

Andap juga berpesan kepada Bupati Koltim dan segenap jajaran ASN Pemkab Koltim agar tidak melupakan jati dirinya sebagai Pelayan Masyarakat yang harus melayani masyarakat dengan cepat, tepat, ikhlas dan tanpa pamrih serta secara optimal memenuhi Hak-hak Konstitusional Masyarakat.

"Selaku ASN seyogyanya kita adalah Pelayan Masyarakat, layanilah Masyarakat dengan baik dan sepenuh hati. Saya ingatkan untuk terfokus dalam pemenuhan Hak-hak Konstitusional rakyat sebagaimana implementasi dari amanat pembukaan UUD NRI 1945," pesan Andap.

Di akhir peringatan upacara, Pj Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat Koltim berupa alat kewirausahaan serta dukungan dana pendidikan.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyerahkan kepada 20 kelompok, dalam bentuk alat kewirausahaan yakni mesin jahit, perbengkelan, dan olahan pangan. Tadi, kami juga menyerahkan dana pendidikan masing-masing Rp. 1.000.000,- bagi 200 siswa/i SMA/SMK/SLB se Kabupaten Koltim," pungkasnya.

Selain menghadiri peringatan hari jadi ke-11 Kabupaten Koltim, Pj Gubernur

juga meninjau hasil pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kecamatan Tirawuta, Koltim.

Sebelumnya, saat Kunker di Kabupaten Kolaka Utara, Pj Gubernur menyerahkan juga bantuan bagi kelompok tani meliputi herbisida, bibit jagung, racun tikus, dan vaksin jembrana bagi kelompok tani. Selain itu, disalurkan juga bantuan pendidikan meliputi pembangunan & rehab Gedung SMAN 1 Ranteangin, SMAN 1 Batu Putih, Gedung area serta pengadaan buku perpustakaan SMAN 1 Porehu, Gedung dan peralatan pendidikan IPA SMAN 1 Lasusua, Gedung dan buku perpustakaan SMKN 4, dan Gedung SMA Muhammadiyah Pakue Kolut. Serta bantuan alat kewirausahaan seperti mesin produksi gula aren, mesin olahan pangan, dan mesin jahit.

"Semua ini semata-mata sebagai bentuk kewajiban kami dalam melayani masyarakat. Saya hanya menyalurkan kembali hasil dari pajak yang dibayarkan ke negara," tutup Andap. (*)

Sekda Prov. Sultra membacakan sambutan Pj. Gubernur pada Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI

Pewarta: Amran

KONUT, BP- Tepat pukul 08.00 wita, Sekda Prov. Sultra, Asrun Lio, bersama Danrem 143 HO mendampingi Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman di Halaman Kantor Bupati Konawe Utara.

Disambut Bupati Konawe, Rukhsamin, Danlanal, jajaran eselon 1 Kementerian RI, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan, Dr. Rusdin Jaya, Kadis Kominfo, Dr. Ridwan Badallah, Kapolres Konut, melanjutkan perjalanan menuju Lokasi penanaman Jagung dan pembinaan petani Desa Molame, Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

Pada kegiatan tersebut diawali dengan sambutan Bupati Konawe Utara dan selanjutnya Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Sekda Prov. Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., PH.D.,

Dalam kunjungan kerja Amran Sulaiman, pada kegiatan Penanaman Per-

dana Komoditi Jagung dan Pembinaan petani Jagung.

Pada kegiatan ini dihadiri Danrem 143 HO, Danlanud Kendari, Mewakili Kapolda, Dandim Konut, Kapolres Konut, Rombongan mentan, jajaran Kepala OPD Sultra (Kadis pertanian, Kadis kominfo, Kadis Ketapang, Kadis perkebunan, Karo pembangunan), jajaran kepala OPD Konut, Camat, Lurah, Kepala Desa, penyuluh, petani, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan

Dalam sambutan-pj Gubernur Sultra, yang dibacakan oleh Asrun Lio menekankan bahwa luas dataran sekitar 38.068 KM2 hanya 28% dimanfaatkan untuk pertanian dalam arti luas.

Selanjutnya Asrun Lio membacakan bahwa 2.726.590 penduduk sultra sebagian besar mata pencaharian di bidang pertanian. Masih banyak kontribusi pertanian dalam arti luas memengaruhi

perekonomian daerah yg ditinjukan dengan kontribusi PDRB pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,06%. Dimana Sub-sektor tanaman pangan, Holtikultura, perkebunan dan peternakan menyumbang 12.00%.

Selanjutnya sambutan Pj. Gubernur yg dibacakan Asrun Lio, menyatakan bahwa potensi lahan produktif pertanian di Sultra seluas 2.858.277Ha terdiri dari sawah fungsional seluas 124.010 Ha dan ladang lahan kering 2.734.267 Ha, yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan perkebunan.

Sementara itu lanjut dibacakan Asrun Lio potensi lahan Baku sawah di Kabupaten Konawe Utara seluas 1.465Ha. Yg cukup luas adalah lahan kering.

Asrun Lio juga membacakan bahwa potensi tanaman pangan khususnya produksi padi mengalami surplus sejak 2 Juni 2018 mengirim beras ke Sulawesi



Utara dan Surabaya sebanyak 1000 ton komoditas jagung. Oleh sebab itu, diharapkan Menteri Pertanian memberikan bantuan program terkait.

Diakhir bacaan Asrun Lio, menyatakan bahwa akan menitikpkan pesan masyara-

kat Sultra kepada Amran Sulaiman bahwa potensi pertanian dalam arti luas di Sultra perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Khususnya alokasi APBN berupa dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga dapat mendukung

pencapaian swasembada beras dan jagung secara nasional. "Kami siap mendukung dan menyukseskan program Kementerian Pertanian RI dalam upaya menyiapkan pangan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. (*)

Kaum Perempuan Hendaknya Tidak Melupakan Tugas sebagai Istri bagi Suami dan Ibu bagi Anak-anak



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Kaum Perempuan hendaknya sukses dalam karir tidak boleh melupakan tugas dan keajaiban sebagai seorang istri bagi suami dan ibu bagi anak-anak. Kaum perempuan untuk maju dan memberdayakan diri selama hal itu dilakukan secara positif dan bermanfaat.

Hal itu dikatakan Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSI dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSI pada Puncak Peringatan HUT Dharmaw Wanita Persatuan Kabupaten Buton yang digelar di Aula Kantor Bupati Buton di Takawa, Pasarwajo, 27 Desember 2023.

“Oleh karenanya, menjadi harapan dan pesan saya kepada kaum perempuan hendaknya sukses dalam karir atau pekerjaan apapun, harus dibarengi dengan sukses membina keluarga jangan melupakan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri bagi suami, maupun ibu bagi anak-anak jangan remehkan peran ibu, kita semua dapat tumbuh besar dan bisa seperti ini, tak lepas dari peran ibu, di samping ayah,” kata Pj. Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Buton.

Turut hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton,

Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Buton, Ketua Bayangkari Polres Buton beserta Anggota, Ketua Adhyaksa Dharmakarini dan Anggota, Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Buton.

“Dirgahayu ke-24 dharma Wanita Persatuan dan Selamat Hari Ibu ke-95. Semoga dua peringatan ini penuh makna yang mendalam sebagai upaya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan serta wujud penghargaan dan penghormatan kita terhadap kiprah dan pengabdian kaum perempuan dalam kehidupan keluarga masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.

Dikatakannya, Peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan dan Hari Ibu tahun ini diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

“Saya juga berharap agar peran dan kualitas organisasi wanita yang ada, dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak peluang dan tantangan pembangunan ke depan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pj. Bupati mengajak masyarakat dan berbagai pihak

terkhusus kepada kaum perempuan untuk maju dan memberdayakan diri selama hal itu dilakukan secara positif dan bermanfaat.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton, Ny. Kiki Amalia Asnawi menyampaikan sejalan dengan pesan yang disampaikan Ibu Kartini pada Hari Ulang Tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan sekaligus peringatan Hari Ibu ke-95, Organisasi ini yang terus menjadi rumah bagi semua pihak sekaligus menjadi pilar penting dalam menguatkan peranan perempuan Indonesia

“Sebagai rumah, organisasi harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh anggotanya untuk saling mendukung satu sama lain sehingga potensi masing-masing anggota dapat berkembang secara optimal sebagai pilar pembangunan ibu-ibu pengurus dan anggota DWP merupakan kekuatan yang luar biasa besar dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Ketua DWP juga menyampaikan untuk selalu bersamasama senantiasa memberikan kontribusi yang bermakna dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai sosial budaya. “Mari kita manfaatkan momentum ini untuk bersyukur atas perjalanan Dharma Wanita Persatuan yang panjang

dan tidak luput dari tantangan. Juga untuk merefleksikan semua perjuangan yang telah kita tempuh sebagai bekal melaju ke depan,” katanya.

“Terima kasih saya ucapkan kepada setiap individu yang terus berperan aktif mendukung, dan mencurahkan dedikasinya untuk keberlangsungan dan capaian DWP. Semoga kita selalu padu dalam kebersamaan dan gotong royong untuk membangun keluarga, lingkungan, dan bangsa menuju Indonesia Emas,” lanjutnya.

Hut Dharma Wanita dan Hari Ibu dirangkaikan dengan Pengumuman Juara Lomba dalam rangka peringatan hut DWP ke-24 dan Hari Ibu ke-95 sebagai berikut:

A. Lomba senam kreasi Se-kecamatan tingkat Kabupaten Buton

- Juara 1 Kecamatan Siotapina,
- juara 2 Kecamatan Kapontori,
- juara 3 Kecamatan Lasalimu Selatan.

B. Lomba Senam Kreasi antar OPD dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten Buton

- Juara 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton,
- Juara 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Juara 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
- Juara harapan 1

- Juara harapan 1

Pj Bupati Buton Tengah Andi Muh Yusuf Hadiri HUT ke 11 Koltim



Laporan: Ardi

KOLTIM, BP-Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf menghadiri Upacara Peringatan HUT ke 11 Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) yang berlangsung di lapangan Rujab Bupati Koltim, Kamis (11/1/2023).

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menjadi Inspektur Upacara peringatan HUT ke 11 Kabupaten Kolaka Timur yang mengusung tema “Sebelas Tahun Wonua Sorume, Terus Melaju Untuk Kolaka Timur Maju”.

Dalam amanatnya, Pj Gubernur menyampaikan beberapa pesan, yang intinya terdapat tiga hal yang disingkat menjadi ABR.

ABR yakni, Alhamdulillah dengan

segala pencapaian, Bersyukur dengan segala apa yang telah diberikan dan dicapai, serta Rencana matang dan mantap dalam membangun daerah.

“Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Sultra saya mengucapkan selamat HUT ke 11 kepada Pemkab dan masyarakat Koltim, semoga Koltim semakin maju, sejahtera dan modern dari waktu ke waktu kata Pj Gubernur Sultra.

Di momen HUT ke 11 HUT Koltim ini, Pj Gubernur, Andap Budhi Revianto menyalurkan bantuan kepada masyarakat Koltim berupa alat kewirausahaan serta dukungan dana pendidikan, meninjau hasil pembangunan rumah tidak layak huni.

Dalam rangkaian HUT Kabupaten

Koltim yang digelar di lapangan Matobundu Kecamatan Tirawuta dari tanggal 9-14 Januari di meriahkan dengan berbagai kegiatan, antara lain Pameran UMKM, karnaval budaya, pagelaran seni dan budaya, fashion show, senam kreasi dan lulo, karaoke bersama, lomba-lomba lain serta live performance dengan tampilan artis ibu-kota

Hadir dalam upacara ini, selain Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis bersama istri, hadir juga sejumlah pejabat dan kepala daerah se-Sultra, Sekda Koltim, Ketua DPR Koltim, Dandim 1412 Kolaka, Kapolres Koltim, Forkopimda Koltim, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Koltim dan ratusan peserta. (*)



Dinas Perhubungan

- Juara harapan 2 Dinas Kesehatan
- Juara harapan 3 Dinas Pendidikan

C. Lomba Kereta Balon tingkat Kabupaten Buton

- Juara 1 Kecamatan Lasalimu Selatan,
- Juara 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Juara 3 Dinas Perhubungan Kabupaten Buton
- Juara Harapan 1 Kecamatan Lasalimu,
- Juara harapan 2

Kecamatan Wabula,

- Juara harapan 3 Dinas Damkar
- Juara harapan 3 Dinas Pendidikan

D. Lomba ekstaffet kardus Tingkat Kabupaten Buton

- Juara 1 Dinas Damkar
- Juara 2 Kecamatan Lasalimu,
- Juara 3 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Juara harapan 1 Dinas Pariwisata
- Juara harapan 2 Sekretariat Daerah
- Juara harapan 3 Badan Keuangan dan Aset Daerah

E. Lomba Daur Ulang Sampah tingkat kabupaten Buton

- Juara 1 Asisten III,
- Juara 2 Satpol PP
- Juara 3 Badan Penanggulangan Bencana
- Juara harapan 1, Kecamatan Kapontori
- Juara harapan 2, Kementerian Agama,
- Juara harapan 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (*)

BBLKM Surabaya Jadi Rujukan Nasional Wilayah Timur, Menkes: Fasilitas Lengkap!



Laporan: Yeti

SURABAYA, BP-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya pada Sabtu (13/1/2024). Kunjungan tersebut untuk memastikan semua fasilitas laboratorium berfungsi dengan baik. Setibanya di lokasi, Menkes Budi dan rombongan langsung meninjau fasilitas di BBLKM Surabaya, di antaranya laboratorium polymerase chain reaction (PCR), laboratorium virologi, laboratorium tuberkulosis (TBC), laboratorium toksikologi, laboratorium kimia amami (food and beverage), dan laboratorium imunologi.

“Lengkap di sini, ya,” ujar Menkes Budi di tengah-tengah peninjauan fasilitas BBLK Surabaya, Sabtu (13/1/2024).

BBLKM Surabaya menjadi rujukan nasional pengujian antimikroba (AMR) tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi sebagian besar untuk rujukan masyarakat Indonesia bagian timur.

Saat ini, BBLKM Surabaya terus memperkuat perannya sebagai laboratorium

untuk pengawasan AMR, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Sebagai laboratorium rujukan nasional, pengendalian resistensi antimikroba di BBLKM Surabaya mampu mengetahui jenis kuman dalam hitungan menit, sehingga memudahkan dokter untuk segera memberikan terapi kepada pasien dengan akurat.

Selain laboratorium, Menkes Budi juga meninjau fasilitas lain seperti taman, furnitur, dan fasilitas lainnya demi kenyamanan masyarakat yang sedang berkunjung.

Peninjauan ini penting dilakukan karena BBLKM Surabaya memiliki sejumlah wilayah bimbingan teknis dan menjadi rujukan nasional untuk wilayah timur Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52/MENKES/Per/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, wilayah bimbingan teknis tersebut meliputi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Karena itu, kelengkapan dan kelayakan fasilitas BBLKM per-

lu menjadi perhatian agar bisa dijadikan percontohan untuk wilayah lain.

Pada kesempatan itu, Menkes Budi juga meminta pimpinan BBLKM untuk mengukur efisiensi kerja SDM dan hambatan-hambatan operasional yang harus segera diselesaikan. Hal yang juga penting adalah gaji SDM tidak boleh ada yang berkurang.

Sebagai informasi, balai besar laboratorium tersebut sebelumnya merupakan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK). Menyusul terbitnya persetujuan Kementerian PANRB atas Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu saat konferensi pers update penanganan polio, Jumat (12/1/2024).

Dirjen Maxi menjelaskan Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua

Atasi KLB, Imunisasi Polio Tambahan Digelar Serentak di Tiga Daerah



Laporan: Warman

JAKARTA-Kementerian Kesehatan bakal menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio atau Sub PIN Polio secara serentak mulai 15 Januari 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) polio, menyusul penemuan kasus lumpuh layu di Kabupaten Pamekasan dan Sampang, Jawa Timur; serta Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

“Pemerintah bersama Komite Imunisasi Nasional telah memberikan rekomendasi untuk segera merespons KLB dengan memberikan imunisasi tambahan atau yang dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN Polio),” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu saat konferensi pers update penanganan polio, Jumat (12/1/2024).

Dirjen Maxi menjelaskan Sub PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024, sedangkan putaran kedua

akan berlangsung mulai 19 Februari 2024. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antarputaran minimal satu bulan.

Wilayah pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya KLB polio. Pemberian imunisasi tambahan juga dilakukan di Kabupaten Sleman DIY, yakni daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, lokasi ditemukannya kasus polio beberapa waktu lalu.

“Sekalipun di DIY

tidak ada kasus, tapi yang kita takuti itu, sirkulasi virusnya ada di kabupaten tetangga, sama seperti di Aceh, imunisasi tambahan juga kita lakukan di Sumatera Utara,” terang.

Dirjen Maxi membeberkan Sub PIN Polio ini menargetkan anak berusia 0 sampai 7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Artinya, meski status imunisasi sudah lengkap, anak tetap harus mengikuti program Sub PIN Polio.

“Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran dan merata di setiap

tingkatkan, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten,” ucapnya.

Soal vaksin, Dirjen Maxi mengungkapkan bahwa jenis vaksin yang akan digunakan pada Sub PIN Polio kali ini adalah vaksin generasi terbaru, yaitu Novel Oral Polio Vaksin tipe 2 atau nOPV2, yang diberikan sebanyak dua tetes dengan interval minimal satu bulan.

Imunisasi dapat didapatkan masyarakat secara gratis di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, satuan pendidikan seperti PAUD, TK, SD/ sederajat serta pos imunisasi lainnya di bawah koordinasi puskesmas.

“Walaupun ada Sub PIN Polio, pelayanan Imunisasi rutin di fasyankes tetap berjalan seperti biasa,” tutup Dirjen Maxi. (Kemenkes)

Penderita Diabetes Tinggi, Menkes: Pencegahan di Puskesmas Harus Dioptimalkan

Laporan: Yeti

TOJO UNAUNA-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh puskesmas di Kabupaten

Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, agar memaksimalkan perannya dalam melakukan pencegahan diabetes sejak dini. Hal ini lantaran angka

penderita diabetes di wilayah itu cukup tinggi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, jumlah penderita dia-

betes pada 2023 mencapai 9.775 orang dan hingga kini baru sekitar 4.248 orang yang ditangani. Artinya, banyak penderita diabetes yang belum terangani dan dikhawatirkan kondisinya terus memburuk.

Menkes Budi menyebut salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan layanan pemeriksaan gula darah menggunakan

alat hematoanalyzer yang saat ini telah tersedia di puskesmas. Tes ini sangat penting untuk memonitor kadar gula darah. Sehingga, apabila hasil tes kadar gula darah tinggi dapat menjadi indikasi seseorang terkena diabetes.

“Diabetes itu dicegahnya harus di puskesmas, jadi dicek darahnya, kalau sudah di atas 200, dikasih obat, obatnya gratis,”

kata Menkes Budi saat meninjau layanan kesehatan di RSUD Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/1/2024).

Menkes menilai, cara ini lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan di rumah sakit. Selain bisa mengatasi diabetes sejak dini dengan biaya yang relatif murah, langkah ini juga dapat mengurangi

penumpukan pasien di rumah sakit.

“Kalau ini jalan, tidak perlu dikirim ke sini (RSUD). Jadi, rumah sakit nggak penuh. Apa yang bisa ditangani di puskesmas, sebaiknya dilakukan di sana. Itu lebih murah,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Souvianur Kure mengatakan bahwa pemeriksaan gula da-

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma
Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal
Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :
Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

KPK Ajukan Banding atas Vonis 14 Tahun Rafael Alun



KPK mengajukan banding atas vonis 14 tahun yang diberikan Pengadilan Tipikor terhadap Rafael Alun Trisambodo

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap terdakwa kasus gratifikasi dan TPPU Rafael Alun Trisambodo.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor memberikan vonis berupa hukuman 14 tahun penjara kepada Rafael Alun.

"Setelah Tim Jaksa KPK analisis pertimbangan majelis hakim, maka hari ini (12/1) tim jaksa telah ajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui PN Ja-

karta Pusat atas putusan majelis hakim dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (11/1).

Ia mengatakan banding itu diajukan lantaran majelis hakim dinilai belum mempertimbangkan beberapa fakta hukum mengenai aset yang diduga dari hasil korupsi dan TPPU.

"Sebagai bagian efek jera maka kami berupaya optimalisasi aset recovery hasil kejahatan korupsi dengan melakukan penyitaan dan perampasan untuk dikembalikan kepada negara," kata Ali.

Mantan pejabat

Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo divonis dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis disampaikan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Majelis hakim menyatakan Rafael terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tak hanya itu, Rafael juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp10 miliar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. (*)

SYL Diperiksa Lagi, Dikonfrontasi dengan Ajudan Firli Bahuri

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali diperiksa penyidik gabungan di kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri, pada Jumat (12/1).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, SYL tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 14.15 WIB. Dia menumpang mobil tahanan KPK dengan tangan diborgol. SYL lalu menjalani pemeriksaan sekitar dua jam.

"Hari ini pemeriksaan yang kesekian kali. Saya berproses, seperti apa yang diharapkan kooperatif dan saya sehat setiap saat dibutuhkan," katanya usai diperiksa, Rabu (12/1).

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak juga membenarkan ihwal pemeriksaan lanjutan terhadap SYL tersebut.

"Benar bahwa hari ini Jumat, tanggal 12



Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Januari 2024, saksi SYL kembali dipanggil oleh Tim Penyidik untuk kepentingan pemeriksaan," jelasnya.

Selain SYL, Ade mengatakan terdapat lima orang saksi lainnya yang juga bakal dimintai keterangan oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Dua diantaranya, kata dia, merupakan mantan ajudan dan pegawai pribadi dari tersangka Firli Bahuri.

"Penyidik juga memanggil 5 orang saksi lainnya untuk dimintai keterangan tambahan, di antaranya eks ajudan tersangka FB yaitu Kevin dan eks walpri (pengawal pribadi)

tersangka FB yaitu Hendra," ujarnya.

Selain SYL, Polisi juga Periksa 2 Mantan Petinggi Kementan Hari Ini

Sebelumnya SYL juga telah diperiksa penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri selama hampir 13 jam pada Kamis (11/1).

Usai diperiksa, SYL mengaku telah menjelaskan apa yang ia alami dan ketahu kepada penyidik dalam kasus dugaan pemerasan tersebut.

"Terima kasih kalian sudah menunggu sampe malam. Apa yang diminta oleh penyidik sudah saya sampaikan sampai tengah malam untuk kesekian

Berkas Firli Lewati Deadline Pelimpahan Kembali, Kejati Masih Tunggu



Eks Ketua KPK yang kini jadi tersangka pemerasan, Firli Bahuri.

Laporan: Hamid

JAKARTA, BP-Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyebut tak ada konsekuensi hukum jika kepolisian mengembalikan berkas perkara pemerasan dengan tersangka eks Ketua KPK, Firli Bahuri melewati tenggat waktu yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Diketahui, berdasarkan ketentuan penyidik semestinya kembali menyerahkan berkas perkara Firli ke kejaksaan pada Kamis (11/1) kemarin. Namun, hingga berakhirnya hari, tak ada informasi dirilis mengenai pelimpahan kembali berkas persiapan jenderal bintang tiga Polri itu dalam kasus pemerasan.

Pada Kamis lalu diketahui penyidik masih melakukan pemenuhan berkas perkara tersebut sesuai petunjuk jaksa. Bahkan, pada hari tersebut, penyidik juga memeriksa eks Mentan, SYL untuk dimintai keterangan tambahan.

"Batas waktu itu tidak menyangkut konsekuensi lho. Di

kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) memang disertakan 14 hari, tapi tidak ada konsekuensinya, jadi kita tetap menunggu," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Herlangga Wisnu Murdianto saat dihubungi wartawan kemarin sore.

Herlangga menyebut saat ini pihaknya hanya menunggu kapan penyidik akan mengembalikan berkas perkara tersebut. Selama prosesnya, kata dia, tetap dilakukan koordinasi antara penyidik dengan jaksa.

Di sisi lain, Herlangga menerangkan ketentuan ini tak berlaku pada jaksa. Ia menuturkan jaksa harus mematuhi ketentuan batas waktu dalam memeriksa suatu berkas perkara.

Herlangga menyebut berkas perkara otomatis akan dinyatakan lengkap atau P21 jika jaksa tidak lagi memberi petunjuk dalam waktu yang ditentukan.

"Betul berbeda. Kalau di kita, kita harus menentukan sikap. Lewat dari 14 hari dianggap P21. Kalo pengembalian

tidak ada waktunya," ujarnya.

Lebih lanjut, Herlangga meminta kepada penyidik untuk melengkapi petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa, sehingga berkas perkara bisa dikembalikan dan dinyatakan lengkap.

"Nah (berkas perkara) enggak boleh bolak balik, makanya itu tadi, ya sekali harus udah beres. Makanya mereka (penyidik) sedang bekerja keras," ucap Herlangga.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lagi dari kepolisian apakah berkas perkara Firli sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan kembali ke kejaksaan.

Kejati DKI Jakarta sebelumnya mengembalikan berkas perkara Firli Bahuri karena dinyatakan belum lengkap. Sesuai ketentuan, berkas itu harus kembali diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan pada 11 Januari.

"Iya betul [paling lambat Kamis 11 Januari]," kata Plh Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Murdianto saat dihubungi, Selasa

(9/1). Terkait hal itu, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas sesuai petunjuk jaksa.

Materi pemenuhan P19 itu di antaranya, pemeriksaan saksi baru, permintaan keterangan tambahan saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, serta permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Firli lantas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan tak dapat menerima gugatan praperadilan Firli. (*)

kalinya," ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Sementara itu Jamaluddin Koedoeboen mengatakan dalam pemeriksaan itu kliennya dikonfrontir terhadap 7 orang saksi lainnya oleh penyidik.

"Kendati demikian, ia enggan membeberkan lebih jauh ihwal materi pemeriksaan lantaran menjadi kewenangan dari penyidik.

Hanya saja, kata dia, pemeriksaan hari ini semakin membuat terang kasus pemerasan yang dilakukan oleh Firli tersebut.

"Yang jelas setiap pertanyaan secara konfrontasi antara SYL dan berbagai pihak tadi semua telah dijawab. Menurut he-mat kami sudah ada sinkronisasi dari berbagai macam pernyataan maupun jawaban," jelasnya.

"Dari masing-masing Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mengerucut pada substansi permasalahan yang memang teman-teman penyidik ingin dapatkan," imbuhnya.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU

Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Firli lantas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan tak dapat menerima gugatan praperadilan Firli. (*)

Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kelurahan Bone-Bone Gelar Pesona Tenun Bone-Bone 2024



Laporan: Ardi Toris

BAUBAU, BP- Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kelurahan Bone-Bone dalam melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem maka mengawali tahun 2024 dengan menggelar Pameran Pesona Tenun Bone-Bone 2024.

Hal ini diungkapkan Lurah Bone-Bone Ramadan dalam siaran persnya Kamis malam (11/1/2023).

Menurut Ramadan, pameran pesona tenun Bone-Bone rencananya akan diselenggarakan di Lippo Plaza Baubau mulai tanggal 26-28 Januari 2024. "Persiapan sudah sampai tahap komunikasi dengan pihak manajemen Lippo Plaza Baubau, dan alhamdulillah pihak Lippo mensupport acara ini", jelasnya.

Ditambahkan, Pesona Tenun Bone-Bone 2024 akan mengikutsertakan penenun tradisional yang ada di Kelurahan Bone-Bone dan pelaku UMKM Kelurahan Bone-Bone, bertujuan untuk mengenalkan potensi-potensi di wilayah Kelurahan Bone-Bone, dengan

harapan Bone-Bone semakin dikenal sebagai salah satu pendukung industri pariwisata di Kota Baubau khususnya tenun dan UMKM, serta menjadi media intervensi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan extreme dengan membuka peluang pasar sebesar-besarnya bagi pelaku usaha tenun dan umkm yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kemandirian warga.

Pesona Tenun Bone-Bone diinisiasi oleh Lurah, RT, RW, LPM, Bhabinkabtibmas, Babin-sa, TP PKK dan Kader-Kader Kelurahan Bone-Bone yang pembiayaannya disisipkan dari hasil Juara I Lomba Inovasi Daerah Desember 2023 lalu dimana Kelurahan Bone-Bone menjuarai kategori Lomba Inovasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas "hadiahnya kami sisipkan untuk modal intervensi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kepentingan warga Bone-Bone, disamping itu RT, RW, LPM turut berpartisipasi tujuannya agar pelaku tenun dan UMKM yang mengi-

kuti Pesona Tenun Bone-Bone 2024 tidak dipungut biaya, syaratnya KTP dan usahanya ada di Kelurahan Bone-Bone dan pengujung diberi kesempatan untuk mencoba menggunakan alat tenun tradisional yang didampingi oleh penenun Bone-Bone, talkshow, workshop dan diskusi, pariwisata, tenun dan UMKM," tambahnya.

Pesona Tenun Bone-Bone 2024 yang mengusung tema "Potensi pariwisata tenun dan UMKM sebagai media intervensi pemerintah melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem" yang diselenggarakan di Atrium Lippo Plaza Baubau ini diharapkan menjadi pemicu geliat dan dinamika Tenun dan UMKM khususnya di Kelurahan Bone-Bone, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi serta menjadi agenda rutin kelurahan, sebagaimana event sebelumnya yaitu Festival Kuliner Tradisional Bone-Bone juga telah menjadi agenda tahunan Kelurahan Bone-Bone, sebagai wujud eksistensi dan kontinuitas program-program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bone-Bone," tutupnya. (*)

Pemkot Baubau Gagas Kerja Sama Dengan Sejong Institute



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau kini menjajaki kerja sama dengan Sejong Institute sebuah organisasi yang bernaung di Pemerintah Nasional Korea. Dan untuk menindaklanjuti itu, Kamis (11/1/2024) bertempat di rujab Wali Kota Baubau, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si telah melakukan pertemuan dengan pihak Korea Ciacia Culture Exchange Association (KCCA).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ibnu Wahid, ST, MBA mengungkapkan, sebelum kerja sama dilakukan antara Pemkot Baubau dengan Sejong Institute maka terlebih dahulu Sejong Institute harus menggendong Non Governmental Organization (NGO) yang ada di Kota Baubau yang

salah satunya adalah Korea Ciacia Culture Exchange Association (KCCA) yang sudah melakukan pertemuan dengan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi.

Saat ini menurut Ibnu Wahid, KCCA sementara mengurus kelengkapan administratifnya di Kementerian luar negeri dan

kalau semua sudah selesai maka akan ditindaklanjuti dengan mengagagas perjanjian kerjasama tersebut dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sejong Institute.

Dikatakan, bentuk kerjasama dengan Sejong Institute itu diantaranya dalam bidang pendidikan

terutama pembelajaran Bahasa Korea. Kemudian, bila MoU nya sudah selesai maka kedepan legalitas kelembagaannya di Indonesia sudah clear.

"Nah itu akan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan mereka akan memanfaatkan gedung baru yang sudah dibangun menjadi lembaga perpustakaan hari ini sehingga itu menjadi stimulan untuk orang berinklusi membaca di perpustakaan kita," katanya. (*)

Ketahui Serapan Gaji. SILPA Gaji Tahun 2023 di Ekspose

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Pemkot Baubau melakukan ekspose Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di ruang kerja Wali Kota Baubau Palagimata Kamis (11/1/2024). Ekspose tersebut langsung dihadiri Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si bersama Asisten I Setda Kota Baubau yang juga Plt Kepala Inspektorat La Ode Aswad, S.Sos, M.Si dan beberapa OPD yakni Bappeda, BP-KAD, Inspektorat, BKPSDM, Diknas, RSUD dan Dinkes.

Maksud diadakan ekspose SILPA gaji tahun 2023 menurut La Ode Aswad adalah pertama sesuai dengan arahan



Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi saat meeting beberapa waktu yang lalu terkait segera dilakukan audit tentang SILPA gaji. Termasuk penyusunan SOP gaji seperti apa sehingga rekomendasinya menjadi perintah kepada semua pihak TAPD, kepada kepala OPD, kemudian para sekretaris yang terkait langsung dengan pe-

nyusunan penganggaran OPD masing-masing, perencanaan atau fungsional perencanaan bersama bendahara.

Disamping itu, ekspose ini juga dimaksudkan untuk mengetahui serapan gaji 2023 karena ini berkaitan dengan persiapan gaji untuk tahun 2024. Sehingga, kalau sekarang lebih awal dilakukan pembahasan maka lebih awal pula dapat

mengetahui kebutuhan ideal itu berapa pada tahun 2024.

Sehingga, untuk di pergeseran atau di perubahan dapat diketahui kapasitas pendanaan gaji itu berapa.

La Ode Aswad berharap untuk tahun 2024 nanti, SILPA pendanaan di semua aspek dan di semua pembiayaan itu khususnya gaji lebih awal untuk diketahui. (*)